

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami beberapa permasalahan salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Keterbatasan pembiayaan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Penanaman modal dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Thirafi, 2013).

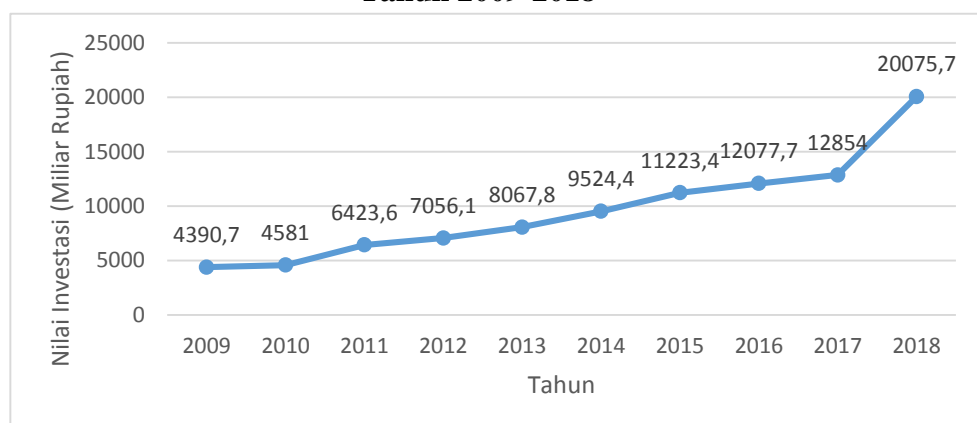
Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang - barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sasana, 2008).

Investasi merupakan salah satu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang menggairahkan investasi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat

pengembalian dan risiko suatu investasi. Investasi atau penanaman modal memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal tersebut ditanamkan

Dalam konteks regional, peningkatan modal atau investasi tersebut bukanlah hal yang mudah karena masing-masing pemerintah daerah memiliki kebijakan dan strategi dalam meningkatkan investasi yang masuk ke daerahnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis faktor yang mempengaruhi investasi bukan dari sektor moneter, namun dari sektor infrastruktur dan *human capital* yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Investasi bagi suatu daerah sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Provinsi DIY. Walaupun ada akselerasi investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap daerah, namun akan selalu ada berbagai kendala yang menyebabkan investasi (PMA maupun PMDN) mengalami fluktuasi.

Grafik I-1
Nilai Total Investasi (PMA dan PMDN) Provinsi DIY
Tahun 2009-2018



Sumber: BKPM Provinsi DIY, diolah

Grafik I-1 menunjukkan gambar perkembangan nilai total investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 – 2018. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi investasi Provinsi DIY menunjukkan laju pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu lebih dari 20 triliun rupiah. Dengan adanya nilai investasi yang tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi dan sebaliknya. Seperti dalam bukunya Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa salah satu penyebab masih rendahnya tingkat pertumbuhan di Indonesia karena masih rendah tingkat investasinya.

Menurut data Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DIY, nilai total investasi PMA dan PMDN di Kabupaten/Kota DIY dapat dilihat pada Tabel I-1.

Tabel I-1
Nilai Investasi Per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	876,986	1.057,18	1.086,725	1.203,956	5.782,517
Bantul	503,203	611,263	743,289	882,98	1.032,031
Gunungkidul	159,028	171,586	184,497	244,921	259,926
Sleman	4.239,758	4.440,743	4.944,507	5.214,692	6.731,925
Yogyakarta	3.745,428	4.942,631	5.118,645	5.307,428	6.269,273

Sumber: BKPM Provinsi DIY, diolah

Pada Tabel I-1 dapat dilihat bahwa perkembangan total investasi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini yakni dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan peningkatan positif. Pada tahun 2015 investasi di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya investasi dari suatu perusahaan yang ingin membangun kawasan industri di daerah tersebut. Pada tahun 2018 investasi terendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 259,926 miliar rupiah sedangkan investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman yakni besarnya lebih dari 6,7 triliun rupiah.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan realisasi investasi di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang signifikan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun di sisi lain penyebaran investasi belum merata. Lokasi investasi, terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul nilai realisasi investasi relatif lebih kecil. Hal tersebut terjadi karena kondisi infrastruktur fisik (jalan, komunikasi, dan listrik) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman relatif lebih baik dibandingkan di ke-3 wilayah kabupaten lainnya. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat juga akan semakin meningkat (Pratama, 2015).

Tabel I-2
Panjang Jalan Per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2014-2018 (Kilometer)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	937,45	821,66	871,21	882,42	882,42
Bantul	1.060,36	810,79	809,05	859,00	846,82
Gunungkidul	959,82	959,47	959,48	1.490,86	1.504,58
Sleman	906,19	918,08	899,59	904,463	899,59
Yogyakarta	248,09	248,09	248,09	233,21	233,21

Sumber: DIY Dalam Angka berbagai edisi

Dari Tabel I-2 dapat diketahui bahwa panjang jalan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY fluktuatif. Kota Yogyakarta memiliki panjang jalan Kota yang cenderung konstan yaitu sepanjang 248,9 Km dalam kurun waktu tiga tahun yakni dari tahun 2014 – 2016. Di Kabupaten/Kota yang lain perkembangan panjang jalan hanya sedikit, hal ini terjadi mungkin karena Provinsi DIY memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Pada tahun 2017 panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 1.490,86 Km dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 959,48 Km. Hal ini dapat terjadi karena ada pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul yakni pantai – pantai di selatan Pulau Jawa yang mulai ramai dikunjungi wisatawan.

Menurut Todaro (2004) modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki *skill* yang

bagus akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Untuk mengetahui perkembangan jumlah angkatan kerja di Provinsi DIY maka dapat dilihat pada Tabel I-3.

Tabel I-3
Angkatan Kerja Per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2014-2018 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	243,541	241,156	258,815	244,415	252,966
Bantul	501,606	510,544	528,161	558,978	577,461
Gunung Kidul	431,612	397,984	427,497	429,476	446,487
Sleman	616,023	599,453	645,255	659,305	675,286
Yogyakarta	230,679	222,326	239,708	225,013	239,542

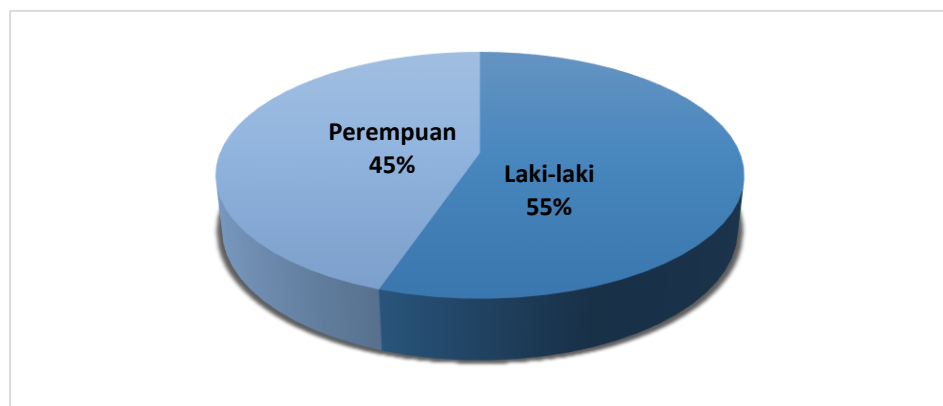
Sumber: Disnakertrans DIY

Berdasarkan Tabel I-3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 - 2018 jumlah angkatan kerja di Provinsi DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Kabupaten/Kota dengan jumlah angkatan kerja terendah adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 239,542 ribu jiwa, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 252,966 ribu jiwa.

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja paling tinggi ada pada Kabupaten Sleman yakni sebesar 675,286 ribu jiwa. Dan dalam setahun terakhir jumlah seluruh angkatan kerja di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY berjumlah lebih dari 2,191 juta jiwa. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

jumlah angkatan kerja pada tahun sebelumnya yaitu 2017 yang hanya 2,117 juta jiwa. Pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-laki di Provinsi DIY sebesar 1.210,267 ribu jiwa sedangkan perempuan berjumlah 981,475 ribu jiwa. Dapat dilihat Grafik I-2.

Grafik I-2
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi DIY Tahun 2018



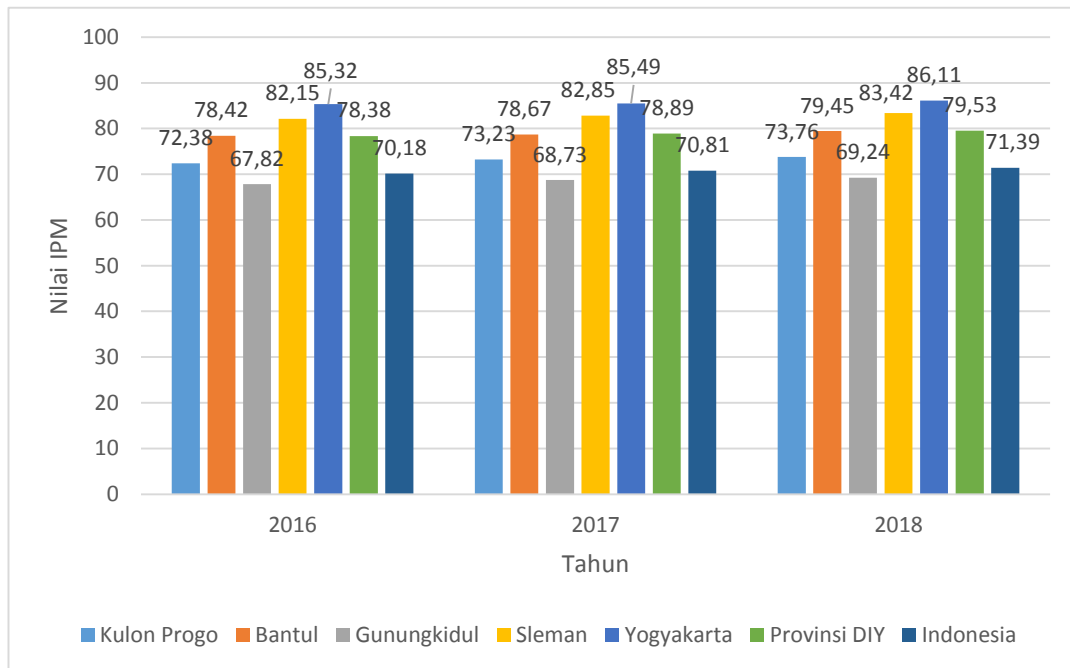
Sumber: Disnakertrans DIY

Setiap tahun perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi DIY selalu lebih besar jumlah penduduk perempuan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan data angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja laki-laki lebih besar dari perempuan. Hal ini dapat terjadi karena laki-laki sebagai kepala keluarga yang wajib bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Keadaan wilayah yang berbeda mendorong setiap daerah untuk menangkap potensi yang dimiliki, salah satunya potensi sumber daya manusia (Tjiptoherijanto, 2002). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik atau sumber daya alam dalam menciptakan suatu output. Sampai tahun 2017 tingkat IPM Provinsi DIY

masuk dalam kategori tinggi yaitu selalu berada pada kisaran 75,0-79,9. Dapat dilihat pada Grafik I-3.

Grafik I-3
Nilai IPM Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2018



Sumber: BPS DIY berbagai edisi, diolah

Grafik I-3 menunjukkan gambar perbandingan antara tingkat IPM di Kabupaten/Kota DIY, Provinsi DIY dan Nasional. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2016 – 2018 IPM tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yang memiliki nilai di atas 80,00. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan tingkat IPM yang juga masuk dalam kategori tinggi. Untuk tingkat IPM terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan angka kisaran 65,00-69,99 dimana angka ini masuk dalam kategori sedang. Selama tiga tahun IPM Kabupaten Gunungkidul selalu berada di bawah IPM Nasional. Hal ini disebabkan karena

tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Gunungkidul paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Irawati (2012) mengungkapkan bahwa faktor kunci dalam mengukur tingkat daya tarik investasi daerah adalah infrastruktur dan kondisi sumber daya manusia. Selain dua faktor tersebut masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dapat membantu pembangunan ekonomi sebuah daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam konteks pembangunan nasional maupun regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Yonathan, 2001). Berikut ini merupakan data pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY dalam lima tahun terakhir. Dapat dilihat Tabel I-4.

Tabel I-4
Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2014-2018 (Persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	4,57	4,62	4,76	5,97	10,84
Bantul	5,04	4,97	5,06	5,10	5,47
Gunungkidul	4,54	4,82	4,89	5,00	5,16
Sleman	5,30	5,18	5,25	5,35	6,42
Yogyakarta	5,28	5,09	5,11	5,24	5,49

Sumber: BPS DIY berbagai edisi, diolah

Tabel I-4 menunjukkan bahwa dalam waktu lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi di lima Kabupaten/Kota DIY cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali Kabupaten Gunungkidul. Lalu pada tahun berikutnya yaitu 2016 mengalami kenaikan namun relatif kecil. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tumbuh paling cepat daripada Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu sebesar 5,97 persen hingga melebihi tingkat pertumbuhan Provinsi DIY yang hanya sebesar 5,26 persen.

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yakni di seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai di atas lima persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi paling besar ada di Kabupaten Kulon Progo yakni sebesar 10,84 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai tertinggi yang telah dicapai Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas variabel infrastruktur panjang jalan, angkatan kerja, IPM, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi. Jika nilai pada variabel yang disebutkan meningkat maka akan terjadi peningkatan pula pada variabel investasi dan begitu juga sebaliknya. Dapat disimpulkan juga bahwa meskipun investasi di DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun investasi belum merata di setiap Kabupaten/Kota Provinsi DIY. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan Judul **“Analisis Data Panel Pengaruh Infrastruktur Panjang Jalan, Angkatan Kerja, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi**

Terhadap Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dengan mengetahui pengaruh dari variabel-variabel tersebut diharapkan dapat diketahui mengapa realisasi investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merata.

B. Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan pembangunan nasional, karena Indonesia masih mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan di berbagai sektor dari negara maju, di tingkat regional maupun global (Sarwedi, 2002). Pada masa sekarang ini, investasi merupakan faktor yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. Peranan investasi di Provinsi DIY memang cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang di butuhkan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi. Sampai tahun 2018 investasi di Provinsi DIY masih menempati posisi paling rendah di Pulau Jawa dan Bali.

Masalah dalam penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh pada ketidakmerataan investasi yaitu kurang tersedianya fasilitas infrastruktur di setiap daerah. Di sisi lain juga untuk melihat pengaruh ketersediaan angkatan kerja, kualitas sumber daya manusia serta laju pertumbuhan ekonomi terhadap investasi di Provinsi DIY. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur panjang jalan terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY?
2. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY?

3. Bagaimana pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY?
4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh infrastruktur panjang jalan terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY.
2. Mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY.
3. Mengetahui pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY.
4. Mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya investasi di Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam ilmu serta teori yang didapat selama perkuliahan terutama dibidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan investasi.
2. Diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh infrastruktur panjang jalan, angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap investasi di Provinsi DIY.

3. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sebagai sumber informasi dan data bagi penelitian berikutnya yang berkaitan.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Penelitian

Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi investasi di Provinsi DIY, penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2009-2018 di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data panel merupakan gabungan antara data silang tempat (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) (Dewi & Kusri, 2014). Adapun model ekonometrika yang digunakan merupakan modifikasi dari jurnal (Pratama dkk, 2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Upah Karyawan Domestik, dan Infrastruktur Terhadap PMA di Jawa Tengah Melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah (Periode 2000-2013)”, jurnal (Dewi dan Triaryati, 2015) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Pajak Terhadap Investasi Langsung” dan penelitian dari (Agustya, 2017) yang berjudul “Determinan Investasi Asing Langsung oleh Perusahaan Multinasional: Studi Kasus Sektor Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016”. Formulasi model ekonometrik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\log \text{Inv}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log \text{Road}_{it} + \beta_2 \log \text{LabForce}_{it} + \beta_3 \text{HDI}_{it} + \beta_4 \text{Growth}_{it} + \mu_{it}$$

di mana :

Inv	= logaritma Investasi (Miliar Rupiah)
$Road$	= logaritma Panjang Jalan (Kilometer)
$LabForce$	= logaritma Angkatan Kerja (Ribuan Jiwa)
HDI	= Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
$Growth$	= Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
log	= operator logaritma berbasis e
β_0	= Konstanta
β_1, \dots, β_4	= Koefisien regresi variabel independen
i	= observasi ke i
t	= tahun ke t
μ	= <i>error term</i> (faktor kesalahan)

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari investasi sebagai variabel dependen serta data infrastruktur panjang jalan, angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Data yang dimiliki merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

- **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis serta sistematika pembahasan.

- **Bab II Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang teori-teori serta informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, hubungan antar variabel, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan hipotesis.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, metode analisis data, jenis dan sumber data serta definisi operasional masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

- **Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan deskripsi pengolahan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data panel. Pembahasan dan hasil analisis yang meliputi seberapa besar pengaruh infrastruktur panjang jalan, jumlah angkatan kerja, IPM dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap investasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- **Bab V Simpulan dan Saran**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

- **Daftar Pustaka**

- **Lampiran**